

Tantangan Administrasi Kurikulum dalam Implementasi Pembelajaran Merdeka: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Alvin Akbar^{1*}

¹ Departemen Kimia, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 7 Maret 2026

Direvisi pada tanggal 4 April 2026

Diterima pada tanggal 25 April 2026

Terbit online pada tanggal 30 April 2026

Kata kunci:

Administrasi Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Administrasi Pembelajaran



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi pembelajaran di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Data diperoleh dari 25 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Portal Garuda dalam rentang tahun 2021–2026 dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik berdasarkan protokol PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama, yaitu: (1) meningkatnya beban administratif guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, (2) kendala adaptasi terhadap digitalisasi administrasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan (3) keterbatasan kapasitas manajerial sumber daya manusia di tingkat sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas, implementasinya masih menghadapi kompleksitas administratif yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan format administrasi serta penguatan kompetensi digital dan manajerial tenaga pendidik.

Penulis Korespondensi:

Alvin Akbar

Email: alvinakbar2023@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Administrasi kurikulum merupakan komponen strategis dalam menjamin efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, administrasi kurikulum tidak lagi bersifat kaku, melainkan menuntut fleksibilitas, kreativitas, dan kemandirian guru dalam merancang pembelajaran (Anggraini, 2022). Transformasi ini bertujuan untuk memberikan ruang inovasi bagi guru, namun pada praktiknya justru memunculkan berbagai tantangan baru.

Perubahan paradigma administrasi dari berbasis dokumen formal menuju berbasis kebutuhan pembelajaran menyebabkan munculnya fenomena yang dapat disebut sebagai “disrupsi administratif”, di mana guru mengalami kebingungan dalam menyesuaikan format administrasi lama dengan tuntutan baru (Zulkifli, 2026). Selain itu, tuntutan penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar berdiferensiasi, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) menambah kompleksitas tugas administratif guru.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beban administratif yang tinggi berpotensi mengurangi fokus guru terhadap kegiatan pembelajaran inti (Irawan, 2022; Ramadhani, 2023). Di sisi lain, integrasi teknologi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diharapkan menjadi solusi justru menjadi tantangan baru, terutama bagi sekolah dengan keterbatasan literasi digital (Hidayat, 2026).

Meskipun berbagai studi telah membahas aspek tertentu dari administrasi Kurikulum Merdeka, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan sintesis komprehensif terhadap temuan-temuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan *Systematic Literature Review*.

2. KAJIAN TEORI

Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Administrasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pendidikan modern, administrasi kurikulum tidak lagi dipahami sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari manajemen pembelajaran. Menurut Cahyono (2021), administrasi kurikulum di era disrupsi digital menuntut adanya integrasi antara aspek manajerial dan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kurikulum harus adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, Gunawan (2023) menegaskan bahwa administrasi kurikulum memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas proses pembelajaran. Administrasi yang baik akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis serta memudahkan evaluasi hasil belajar. Sebaliknya, administrasi yang tidak efektif justru dapat menjadi beban tambahan bagi guru.

Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada penguatan kompetensi, diferensiasi pembelajaran, serta pengembangan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila.

Menurut Anggraini (2022), Kurikulum Merdeka menuntut perubahan paradigma dalam administrasi pembelajaran, dari yang bersifat administratif kaku menjadi lebih fleksibel dan kontekstual. Guru diberikan kebebasan untuk menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Namun demikian, fleksibilitas ini juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan kompetensi guru. Oktavia (2023) menyatakan bahwa tidak semua guru siap dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal diferensiasi dan penyusunan ATP. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia

Beban Administratif Guru

Beban administratif guru merujuk pada jumlah dan kompleksitas tugas administratif yang harus diselesaikan oleh guru selain tugas utama mengajar. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, beban ini mengalami peningkatan terutama pada tahap awal transisi.

Irawan (2022) mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum seringkali diikuti dengan penambahan dokumen administrasi yang harus disusun oleh guru. Hal ini diperkuat oleh Zulkifli (2026) yang menyatakan bahwa beban kerja administratif yang tinggi dapat mengganggu fokus guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Selain itu, Ramadhani (2023) menambahkan bahwa ketidakjelasan format administrasi serta perubahan regulasi yang cepat menyebabkan guru mengalami kebingungan. Wulandari (2023) juga menyoroti bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala utama dalam menyelesaikan tugas administratif secara optimal. Dengan demikian, beban administratif tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga kompleksitas dan kesiapan guru dalam mengelolanya

Digitalisasi Administrasi Pendidikan

Digitalisasi administrasi pendidikan merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi di sekolah. Dalam Kurikulum Merdeka, digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM), e-Rapor, serta berbagai aplikasi pendukung lainnya.

Hidayat (2026) menyatakan bahwa integrasi PMM dalam administrasi pembelajaran memberikan kemudahan dalam penyusunan perangkat ajar dan pelaporan hasil belajar. Namun, Maulana (2026) menemukan bahwa efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi pengguna.

Kendala digitalisasi juga diidentifikasi oleh Darmanto (2026), terutama terkait keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah. Sementara itu, Ningsih (2022) menyoroti rendahnya literasi digital tenaga pendidik sebagai hambatan utama dalam implementasi administrasi berbasis teknologi.

Dengan demikian, digitalisasi administrasi belum sepenuhnya menjadi solusi tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Asesmen

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan salah satu komponen utama dalam Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Fauziah (2022) menjelaskan bahwa administrasi P5 memiliki kompleksitas tersendiri karena tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran. Guru dituntut untuk merancang proyek, melakukan dokumentasi, serta melakukan penilaian secara holistik.

Di sisi lain, asesmen dalam Kurikulum Merdeka menekankan pada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Namun, Lestari (2023) menemukan bahwa implementasi asesmen diagnostik seringkali belum optimal dan hanya dilakukan sebagai formalitas. Hal ini sejalan dengan temuan Vivaldi (2022) yang menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep asesmen yang komprehensif.

Dengan demikian, tantangan dalam implementasi P5 dan asesmen tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman konseptual guru.

Tata Kelola Sekolah dalam Administrasi Kurikulum

Tata kelola sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas administrasi kurikulum. Tata kelola yang baik mencakup koordinasi antar pihak, ketersediaan sarana prasarana, serta kejelasan kebijakan. Tyas (2023) mengidentifikasi adanya hambatan komunikasi antara guru dan tenaga administrasi yang berdampak pada ketidakefisienan pengelolaan dokumen. Selain itu, Gunawan (2023) dan Cahyono (2021) menekankan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi kurikulum.

Perubahan kebijakan yang cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Pratama (2026) menyatakan bahwa sekolah dituntut untuk terus beradaptasi dengan regulasi yang dinamis, yang seringkali belum diimbangi dengan sosialisasi yang memadai. Oleh karena itu, tata kelola sekolah yang efektif memerlukan sinergi antara kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan dukungan kebijakan.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Tahapan penelitian meliputi:

- a) Identifikasi: Pencarian artikel dilakukan melalui Portal Garuda dengan kata kunci "Administrasi Kurikulum Merdeka".
- b) Seleksi (Screening): Artikel diseleksi berdasarkan: tahun publikasi (2021–2026), relevansi dengan topik administrasi kurikulum.
- c) Kelayakan (Eligibility): Kriteria inklusi (artikel penelitian atau kajian ilmiah, membahas administrasi kurikulum merdeka) dan Kriteria eksklusi: (artikel opini tanpa data, artikel duplikat).
- d) Analisis Data: Sebanyak 25 artikel yang memenuhi kriteria dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan langkah: coding data, kategorisasi tema, dan sintesis temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Kompetensi dan Beban Kerja Guru

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka meningkatkan beban administratif guru, terutama dalam penyusunan modul ajar dan ATP. Irawan (2022) menegaskan bahwa transisi kurikulum menyebabkan peningkatan beban kerja administratif yang signifikan.

Kesulitan utama terletak pada tuntutan diferensiasi pembelajaran, yang mengharuskan guru menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa (Efendi, 2023). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman terhadap format baru administrasi (Oktavia, 2023; Ramadhani, 2023).

Secara lebih mendalam, masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas profesional guru. Hal ini sejalan dengan temuan Junaedi (2023) yang menyatakan bahwa peran kepala sekolah dalam memberikan supervisi akademik menjadi faktor kunci dalam mengurangi beban administratif guru.

Digitalisasi Administrasi dan PMM

Digitalisasi melalui PMM dan e-Rapor diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan digital antar sekolah (Maulana, 2026; Hidayat, 2026).

Kendala utama meliputi:

- a) keterbatasan jaringan internet (Darmanto, 2026)
- b) rendahnya literasi digital (Ningsih, 2022)
- c) kurangnya pelatihan penggunaan platform

Meskipun penggunaan Google Workspace dapat membantu (Saputra, 2021), adopsinya belum merata.

Implementasi P5 dan Asesmen

Administrasi P5 menjadi tantangan karena memiliki karakteristik yang berbeda dari pembelajaran reguler (Fauziah, 2022). Guru dituntut untuk:

- a) merancang proyek
- b) melakukan dokumentasi proses
- c) menilai secara kualitatif

Selain itu, asesmen diagnostik seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya menjadi formalitas (Lestari, 2023; Vivaldi, 2022).

Kebijakan dan Tata Kelola Sekolah

Tata kelola administrasi di sekolah juga menjadi faktor penting. Tyas (2023) menemukan adanya miskomunikasi antara guru dan tenaga administrasi. Selain itu, keterbatasan sarana (Gunawan, 2023; Cahyono, 2021) dan perubahan regulasi yang cepat (Pratama, 2026) menyebabkan sekolah kesulitan beradaptasi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi beban administratif guru yang semakin tinggi, terutama dalam penyusunan modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta belum optimalnya kesiapan manajerial sumber daya manusia di tingkat sekolah. Selain itu, implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan asesmen juga menambah kompleksitas administrasi karena menuntut pemahaman konseptual dan teknis yang lebih mendalam. Di sisi lain, faktor tata kelola sekolah, seperti koordinasi antar pihak, ketersediaan sarana prasarana, dan dinamika perubahan kebijakan, turut memengaruhi efektivitas administrasi kurikulum. Secara keseluruhan, meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif yang bersifat sistemik, sehingga diperlukan upaya penyederhanaan administrasi, penguatan kompetensi guru, serta peningkatan dukungan kebijakan dan infrastruktur untuk mengoptimalkan implementasinya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Hade Afriansyah, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, atas bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Masukan dan saran konstruktif dari beliau sangat berperan penting dalam penyempurnaan draf serta kedalaman analisis artikel ulasan literatur ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2022). *Tantangan Guru dalam Administrasi Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan dan Konseling.*
- Bahrudin, M. (2023). *Manajemen Kurikulum Merdeka: Analisis Kesiapan Administrasi Sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan.*

- Cahyono, H. (2021). *Problematika Administrasi Kurikulum di Era Disrupsi Digital*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Darmanto, S. (2026). *Digitalisasi Administrasi Sekolah dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Efendi, R. (2023). *Analisis Kesiapan Guru dalam Menyusun Modul Ajar*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Fauziah, N. (2022). *Kendala Administratif dalam Pelaksanaan P5*. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Gunawan, I. (2023). *Evaluasi Administrasi Kurikulum di SMP*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*.
- Hidayat, T. (2026). *Integrasi Platform Merdeka Mengajar dalam Administrasi Pembelajaran*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Irawan, A. (2022). *Beban Administratif Guru dalam Transisi Kurikulum*. *Jurnal Pedagogy*.
- Junaedi, M. (2023). *Strategi Kepala Sekolah dalam Mengatasi Hambatan Administrasi*. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*.
- Kusuma, W. (2021). *Peran Tenaga Administrasi Sekolah pada Kurikulum Baru*. *Jurnal Administrasi Perkantoran*.
- Lestari, P. (2023). *Tantangan Implementasi Asesmen Diagnostik*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Maulana, R. (2026). *Efektivitas e-Rapor dalam Menyederhanakan Penilaian*. *Jurnal Informatika Pendidikan*.
- Ningsih, S. (2022). *Kesiapan Sarana Prasarana Administrasi Berbasis Teknologi Informasi*. *Jurnal Manajemen Sarana Pendidikan*.
- Oktavia, R. (2023). *Analisis Kompetensi Guru dalam Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)*. *Jurnal Pendidikan Modern*.
- Pratama, B. (2026). *Dampak Perubahan Regulasi terhadap Tata Kelola Administrasi*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Qodir, A. (2022). *Problematika Pengarsipan Dokumen Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Kearsipan Pendidikan*.
- Ramadhani, F. (2023). *Tantangan Guru Penggerak dalam Administrasi Pembelajaran*. *Jurnal Profesi Keguruan*.
- Saputra, M. (2021). *Pemanfaatan Google Workspace untuk Administrasi Pendidikan*. *Jurnal Pengabdian Pendidikan*.
- Tyas, A. (2023). *Hambatan Komunikasi Guru dan Staf Tata Usaha*. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*.
- Utami, S. (2026). *Kajian Literatur: Efisiensi Administrasi di Sekolah Penggerak*. *Jurnal Riset Pendidikan*.
- Vivaldi, D. (2022). *Persepsi Guru terhadap Kompleksitas Administrasi*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*.
- Wulandari, E. (2023). *Manajemen Waktu dalam Sinkronisasi Administrasi*. *Jurnal Manajemen Sekolah*.
- Yasin, M. (2022). *Tantangan Administrasi Kurikulum Non-Formal*. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Zulkifli, A. (2026). *Analisis Kritis Beban Kerja Administratif Guru*. *Jurnal Opini Pendidikan*.